

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga secara normatif sumber utama pasokan pangan harus dapat diproduksi sendiri hingga tingkat rumah tangga. Menurut (Hanafie, 2010) ketahanan pangan bagi suatu negara merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara yang mempunyai jumlah penduduk sangat banyak seperti Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diproyeksikan 270 juta jiwa pada tahun 2025.

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan Ketahanan Pangan (BKP) tahun 2015 mencantumkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pengamanan ketahanan pangan menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi nasional Pemerintah RI. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Mengingat tahun 2015 merupakan estafet dari pelaksanaan pembangunan pertanian pada RPJMN 2010-2014, maka rancangan program, kegiatan dan penganggaran diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan 2014. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup BKP salah satunya dengan fokus kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan kegiatan utama adalah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui Peningkatan Diversifikasi Pangan dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Sebagai dasar pelaksanaan program tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (Badan Ketahanan Pangan, 2014).

Ungkap Suswono selaku Menteri Pertanian-RI, dalam forum regional FAO, awalnya KRPL dikembangkan untuk mengatasi krisis cabai saat terjadi lonjakan komoditi tersebut. Namun, dalam perjalanannya KRPL memberi sedikitnya tiga manfaat, pertama meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH), kedua mengurangi pengeluaran belanja harian rumah tangga, ketiga mampu meningkatkan harmonisasi masyarakat melalui kerjasama antar keluarga dalam memanfaatkan lahan pekarangan. Selain itu, dalam tiga tahun KRPL telah memberdayakan ratusan ribu rumah tangga di lebih dari 12.000 desa dan kelurahan di 33 provinsi seluruh Indonesia. Berkat KRPL Indonesia bisa mengatasi krisis cabai dan pangan pokok, stabilitas harga kebutuhan pokok keluarga stabil dan disaat yang bersamaan dapat menurunkan tingkat kerawanan

pangan dan gizi, seiring dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2014).

Pada tahun 2010 program P2KP sudah tersebar di seluruh provinsi, salah satunya adalah DIY. Berikut data perkembangan jumlah kelompok wanita tani (KWT) yang mengikuti program P2KP di DIY.

Tabel 1. Perkembangan jumlah KWT yang mengikuti program P2KP di DIY

Kabupaten	Jumlah KWT/Tahun					Jumlah
	2010	2011	2012	2013	2014	
Gunung Kidul	10	10	10	10	6	46
Kulon Progo	10	10	10	10	6	46
Bantul	-	20	10	10	-	40
Sleman	-	10	10	10	-	30
Kota	-	-	-	6	-	6

Sumber: BKP DIY, diolah

Dari Tabel 1 terlihat bahwa kelompok wanita tani paling banyak yang mengikuti program P2KP adalah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah masing-masing 46 kelompok wanita tani, selain itu karena kabupaten tersebut menjalankan program terlebih dahulu dibandingkan kabupaten lainnya dan daerah kota. Kabupaten Bantul dengan jumlah 40 kelompok wanita tani, Kabupaten Sleman 30 kelompok wanita tani dan kota sebanyak 6 kelompok wanita tani.

Program P2KP pada tahun 2013 diimplementasikan melalui 3 kegiatan, yaitu program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), dan Promosi P2KP namun dari setiap daerah yang mengikuti program ini tidak semuanya mengikuti kegiatan P2KP. Dari ketiga program tersebut, program KRPL merupakan program yang mampu untuk menciptakan ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional dimulai dari rumah tangga. Selain itu, masyarakat diharapkan bisa lebih meningkatkan

konsumsi aneka ragam sumber pangan lokal dengan gizi seimbang yang dapat menurunkan konsumsi beras. Di Provinsi DIY Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo mengikuti kegiatan KRPL dan MP3L, untuk Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota hanya mengikuti kegiatan KRPL, dan kegiatan promosi P2KP dilaksanakan pada bagian provinsi.

Program P2KP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat secara ekonomis dan dapat melatih kelompok wanita secara mandiri untuk memenuhi ketersediaan pangan pokok, untuk memenuhi pangan dan gizi baik untuk diri sendiri dan dapat dipasarkan ke masyarakat. Selain itu program P2KP-KRPL memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan.

B. Rumusan Masalah

Daerah DIY salah satu kabupaten yang mengikuti program P2KP adalah Kabupaten Sleman. Program ini di Kabupaten Sleman berjalan dari mulai tahun 2011 dengan 10 kelompok wanita tani. Awalnya di Kabupaten Sleman program P2KP ini melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Hingga kini program P2KP di Kabupaten Sleman sudah diikuti oleh 30 KWT. Berikut data jumlah kelompok wanita tani yang mengikuti program P2KP.

Tabel2. Jumlah KWT yang mengikuti program P2KP di Kabupaten Sleman

Tahun Realisasi	Jumlah KWT
2011	10 KWT
2012	10 KWT
2013	10 KWT
Jumlah	30 KWT

Sumber: BKP Sleman, diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kelompok wanita tani yang mengikuti program P2KP selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan banyak bertambahnya jumlah kelompok wanita tani dari tahun ke tahun yang mengikuti program, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya program ini semua kelompok wanita tani telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan serta meraih keberhasilan program.

Pada tahun 2013 Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari sehingga KWT yang terbentuk sebelumnya diharapkan dapat membentuk sebuah kawasan, karena program P2KP-KRPL ini yang menjadi sasarannya adalah kelompok wanita tani yang memiliki beberapa anggota dan berdomisili dalam satu desa sehingga membentuk kawasan.

Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang telah berusaha aktif dalam Program P2KP dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL ini Kabupaten Sleman sangat konsisten dalam realisasi program tersebut. Dalam mewujudkan program P2KP-KRPL Pemerintah Sleman melakukan berbagai strategi diantaranya adalah memberikan dana program. Dana program ini diberikan secara bertahap hal ini diharapkan apabila terjadi permasalahan, dana masih ada tersimpan adapun penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kelompok yang mendapat bantuan untuk dikelola. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan berupa Sekolah Lapang (SL) sehingga kelompok tidak hanya mendapatkan bantuan dana tetapi juga berupa pelatihan untuk menambah

pengetahuan dan keahlian kelompok dalam pelaksanaan program melalui konsep kawasan rumah pangan lestari yang dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, meskipun jumlah kelompok wanita tani di kabupaten Sleman dikatakan sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain, namun dengan adanya program ini kualitas konsumsi pada tahun 2015, Kabupaten Sleman telah mencapai skor PPH tinggi dengan skor PPH 92,7 dibandingkan dengan pencapaian skor PPH nasional yang hanya 83,6, sehingga meskipun Kabupaten Sleman memiliki kelompok sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain namun bisa membuktikan dengan tercapainya skor PPH yang tinggi.

Di Kabupaten Sleman program P2KP-KRPL dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga kelompok wanita tani yang melaksanakan program P2KP-KRPL berjumlah 10 kelompok wanita tani. Namun pada dasarnya dari setiap kelompok dalam menjalankan program masih banyak yang kurang memahami betapa pentingnya program ini dalam penyediaan pangan keluarga yang B2SA sehingga keberhasilan dari setiap kelompok wanita tani itu dalam menjalankan program ini tidaklah sama. Selain itu, kesadaran anggota dalam pelaksanaan program berbeda-beda, sehingga keberhasilan program disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor dari dalam diri anggota itu sendiri maupun lingkungan atau faktor individu dan faktor eksternal. Maka, pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana keberhasilan kelompok wanita tani di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program P2KP-KRPL?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kelompok wanita tani dalam melaksanakan program P2KP-KRPL di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tingkat keberhasilan kelompok wanita tani di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan program P2KP-KRPL.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kelompok wanita tani dalam melaksanakan program P2KP-KRPL di Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya BKP dalam pengembangan konsep pemikiran dalam kebijakan program P2KP-KRPL selain itu dapat dijadikan masukan dan saran untuk mengkaji (*review*) semua aspek yang mempengaruhi keberhasilan program KRPL.